

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1–20.
- Agustianto, & Actika. (2020). TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGENAAN UANG WAJIB TAHUNAN TERHADAP PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERADA DIATAS HAK PENGELOLAAN DI KOTA BATAM. *Of Judicial Review*, 22(1), 112–127.
- Anugrahini, D. N. (2015). Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ). *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(3), 559–570.
- Arianto, D., Turnip, W., Azrianti, S., & Yanti, L. H. (2022). LEGAL REVIEW OF OWNERSHIP STATUS AND METHODS OF TRANSFER OF LAND, 1, 1–8.
- Azis, A. (2022). KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH RUMAH TINGGAL. *Journal of Administration and Sosial Science*, 3, 13–20.
- Cahyaningsih, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA TEGAL (Studi Kasus Pasar Sore diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tegalsari Kota Tegal).
- Ciptono, Malau, P., Arianto, D., Herningtyas, T., & Pramesti, A. W. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 2013–2015.
- Dahen, L. D. (2000). ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI ATAS HAK PENGELOLAAN PELABUHAN, 3(1).
- Darmawan, M., Irawan, D., Nastiti, A., & Arifah, N. (2023). Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik, 5(1), 363–372. doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2385
- DJOHAN OE, M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional (Bpn)(Studi Kasus Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn) Sidoarjo. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 10(1), 3–17.
- Eni, S. P. (2015). Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Masalah Permukiman Kumuh di Perkotaan. *Scale*, 2(2), 243–252.
- Etta Siahaan, C. (2017). ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG DIANGGAP CACAT ADMINISTRASI (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 102/K/TUN/1998, 87(1,2), 149–200.
- Fajriana Kusuma, S. N. (2019). PROSES PEMBERIAN HAK GUNA

- BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK Shofi. *PENA JUSTISIA*, 18(2), 97–106.
- Fitri, R. (2018). Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 421–438.
doi:10.24815/kanun.v20i3.11380
- Franciska, W. (2022). Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Terhadap Objek Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2223. doi:10.37905/aksara.8.3.2223-2238.2022
- hastuti. (2020). Hukum Dan Kebijakan Agraria Di Indonesia.
- Husein, F. P., Abubakar, L., & Lubis, N. A. (2018). Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(1), 84.
doi:10.24198/acta.v2i1.162
- keputusan presiden. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM PRESIDEN (1973).
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2020). HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERATURAN. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 5*(Nomor 1), hlm: 131-138.
- Lamudi, L. (2023). Cara & Biaya Mengubah HGB Menjadi SHM Terbaru 2023.
- Lendrawati, & Christa, G. (2014). PELAKSANAAN PERPANJANGAN UANG WAJIB TAHUNAN OTORITA SAMPAI DENGAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BATAM. *SELAT*, 3(1), 411–424.
- Maileni, D. A. (2019). Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Hak Pengelolaan Dikota Batam. *De Rechtsstaat*, 5(1), 33–41.
doi:10.30997/jhd.v5i1.1729
- maria liju, N. (2017). ASPEK YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI TUKAR-MENUKAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 19961 Oleh:, 1(9), 41–47.
- Mutiah, S. (2018). Hak Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun di atas Tanah Hak Guna Bangunan yang Berdiri di atas Tanah Hak Milik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 148–168.
doi:10.15642/alqanun.2018.21.1.148-168
- Naim, Y. J. (2019, June 21). Rumah di Batam tidak bisa bersertifikat hak milik.
- Nasrudin, N., Washliati, L., & Fadlan, F. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 37–55.
- Nursanti, A. W., & Fadjriani, L. (2020). ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DAN IMPLIKASI HUKUM ATAS HAK TANAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN PERBANKAN (STUDI PENELITIAN DI

- PT. BPR INDOBARU FINANSIA BATAM), 10(02), 18–34.
- peraturan menteri agraria. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN METERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN (1999).
- Peraturan Pemerintah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK ATAS TANAH (1996).
- Rahmi, E. (2010). Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (Hpl) Dan Realitas Pembangunan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 349–360. doi:10.20884/1.jdh.2010.10.3.104
- Rangkuti, A. R. (2016). Efektivitas Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 131–167.
- Sadpri, J. (2014). Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. *Lex Privatum*, 2(3), 154267.
- Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 275–288. doi:10.20303/jmh.v24i2.391
- Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Jurnal Inovatif*, VII(3), 4.
- Sudiarta, I. ketut, Satyawati, N. gusti ayu D., Suharta, I. N., Wiyatna, P. N., Giri, P. N. S., Martana, P. A. H., ... R, P. D. I. (2017). *DIKTAT HUKUM AGRARIA*.
- Sudiyono, S., & Elisa, P. F. (2018). Penerapan Hukum Agraria Terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani Yang Telah dikuasai Lebih Dari 30 Tahun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, XVI, 1720–1749.
- Sunyoto, S., & fatmawati Octarina, N. (2023). KAJIAN YURIDIS KONVERSI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK OLEH YAYASAN. *Advokasi*, 11(01), 48–64.
- Suprihanto, A. (2021). LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS OF HOLDER SECURITY RIGHTS FOR BUILDING RIGHTS OVER.
- Suripno., & Gafur, A. (2015). Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 2(2), 157–168.
- Svinarky, I., & Jamba, P. (2018). Tinjauan Yuridis Kavling Siap Bangun Di Kota Batam. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(2), 110. doi:10.33884/jck.v6i2.803
- undang-undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN (1960).
- Wenur, O. (2016). KONVERSI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960. *Lex Administratum*, 147(March), 11–40.
- Wiguna, I. G. W. O. S., Budiarta, I. N. P., & Seputra, I. P. G. (2020).

Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 157–163. doi:10.22225/jkh.1.1.2149.157-163
Winanti, A., Taupiqqurrahman, & Dika Agustanti, R. (2020). PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK. *Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(2), 431–438.